

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
(UNODC) DALAM PENANGANAN KASUS HUMAN
TRAFFICKING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh

T.SABITAH WILDA AMIRAH

2010853020



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2025**

ABSTRAK

Perdagangan manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Human Trafficking adalah tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima orang dengan cara paksaan, penipuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Berdasarkan data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sepanjang tahun 2019 hingga 2024, lebih dari 1.800 buruh migran Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara lebih rinci, pada tahun 2024 saja, SBMI mendokumentasikan 251 kasus yang memenuhi unsur perdagangan orang. Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat bahwa pada periode 2020 hingga 2022, terdapat 1.581 korban TPPO di Indonesia. Untuk menangani permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran UNODC dalam menangani masalah human trafficking di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa UNODC banyak berperan dalam penanganan kasus Human Trafficking di antaranya adalah, dukungan Hukum, pelatihan aparat penegak hukum, perlindungan korban, dan kampanye kesadaran publik. Dengan hal ini dapat di simpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan organisasi seperti UNODC untuk membantu menangani masalah human trafficking.

Kata kunci: UNODC, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, penanganan

ABSTRACT

Human trafficking or what is better known as Human Trafficking is the act of recruiting, transporting, moving, harboring or receiving people by means of force, fraud or coercion for the purpose of exploitation. This exploitation can include sexual exploitation, forced labor, exile, removal of body organs, or other forms of exploitation. Based on data from the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), from 2019 to 2024, more than 1,800 Indonesian migrant workers became victims of criminal acts of human trafficking (TPPO). In more detail, in 2024 alone, SBMI documented 251 cases that met the elements of human trafficking. Previously, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Ministry of PPPA) noted that in the period 2020 to 2022, there were 1,581 victims of TIP in Indonesia. To overcome this problem, the Indonesian government has issued Presidential Regulation Number 19 of 2023 concerning the National Action Plan for the Prevention and Handling of Human Trafficking Crimes for 2020-2024. This research aims to provide a deeper understanding of UNODC's role in dealing with the problem of human trafficking in Indonesia. In this research, researchers used qualitative methods and found that UNODC played many roles in handling human trafficking cases, including legal support, training for law enforcement officers, victim protection, and public awareness campaigns. With this, it can be concluded that Indonesia really needs an organization likeUNODC to help deal with the problem of human trafficking.

Keywords: UNODC, transnational crime, human trafficking, handling